

JURNAL TRANSPARANSI PUBLIK (JTP)

Volume I. Nomor 3 Maret 2018

Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Secara Merata Kepada Masyarakat di Gampong Meudang Ara Kec. Nurussalam Kab. Aceh Timur

Kredibilitas Pendamping Desa di Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, tulisan ketiga Muammar Khalis menulis tentang Wewenang Camat Di Era Otonomi Khusus Aceh (Studi di Kantor Camat Langsa Kota, Kota Langsa),

Wewenang Camat Di Era Otonomi Khusus Aceh (Studi di Kantor Camat Langsa Kota, Kota Langsa),

Evaluasi Kebijakan Sensus Kendaraan Bermotor Di Kota Lhokseumawe Tahun 2017

Peran Tokoh Adat Dan Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Dalam Kasus Sengketa Tapal Batas di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara

Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016

Perencanaan dan Penganggaran Dana Desa Untuk Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Desa Belang Rakal Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2016

Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Kopi di Kabupaten Aceh Tengah

Modal Insan Dan Sokongan Kerajaan Ke Arah Kejayaan Usahawan Bumiputera: Satu Sorotan

ISSN : 2598-9731



universitas
MALIKUSSALEH

JURNAL TRANSPARANSI PUBLIK PROGRAM MAGISTER
ADMINISTRASI NEGARA (PM-AN) FISIP
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
LHOKSEUMAWE

PELINDUNG

Rektor Universitas Malikussaleh.
(Prof. Dr. Apridar, SE, M.Si)
Dekan Fakultas ISIP
(M. Akmal, S.Sos.,M.Si)

PENYUNTING AHLI

Prof. Dr. Sity Daud.
(Universiti Kebangsaan Malaysia)
Prof. Rashila Ramli.
(Uversiti Kebangsaan Malaysia).
Dr. Saiful Usman, M.Si
(Uversitas Syiah Kuala Banda Aceh)
Dr. Rusman, M.Si
(Universitas Nasional Jakarta)

PIMPINAN UMUM

Dr. Rusydi. SE, M.Si

WAKIL PIMPINAN REDAKSI.

Drs. Aiyub, M.Si
Bobby Rahman, S.Sos.,M.Si

DEWAN REDAKSI

Dr. Rasyidin, M.A
Dr. M. Nazaruddin, M.Si
Dr. Muhammad, M.A
Dr. Muklir. MAP
Dr. Muntasir.,MA
Zulham, M.A
Muhammad Fazil, M.Soc.Sc
T. Alfiadi, S.Sos, M.SP

SIRKULASI

Indra Milia Rahmi, ST
Yulia, SE.,Akt.

SEKRETARIAT

Gedung Pascasarjana Unimal (Program
Magister Administrasi Negara) Fakultas ISIP
Jln. T. Chik Di Tiro No. 26
Lancang Garam, Lhokseumawe
Email : jurnaltransparansipublik@gmail.com
Web : [https](https://)

JURNAL TRANSPARANSI PUBLIK

Jurnal ini merupakan jurnal program magister Administrasi Publik (PM-AP) fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh. Berfungsi untuk menyebarkan informasi hasil pemikiran di bidang Administrasi Negara/Publik, kebijakan publik dan administrasi Pembangunan. Dari hasil penelitian dan tulisan ilmiah gagasan orisinal kritis serta aktual. Jurnal ini terbit 2 kali dalam setahun yaitu bulan Maret dan bulan September.

Redaksi mengundang para dosen, dan praktisi untuk mengisi jurnal ini.

Penyajian dapat berupa tulisan ilmiah, hasil penelitian, gagasan orisinal yang segar, objektif dan bertanggungjawab. Redaksi dapat memperbaiki tulisan yang akan dimuat tanpa mengubah isi dan maksudnya. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dengan dilengkapi abstraknya tidak melebihi 300 perkataan, huruf ariaf 10 diketik pada kertas kuarto, jarak satu spasi disusun dengan urutan: Judul, Nama Penulis, Abstrak, isi tulisan, Daftar Pustaka dan dilengkapi dengan riwayat hidup singkat penulis.

Jika Tulisan merupakan hasil penelitian, disusun dengan urutan: Pendahuluan, tujuan, tinjauan pustaka, pendekatan atau bahan dan metodologi penelitian, hasil dan pembahasan penelitian, kesimpulan dan saran, Panjang Naskah tidak lebih dari 6000 perkataan, dikirim hardcopy dan CD ke sekretariat Redaksi Jurnal Transparansi Publik seperti alamat yang tertera.

DITERBITKAN OLEH :
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI NEGARA
(PM-AN) FAKULTAS ISIP
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH -
LHOKSEUMAWE

DAFTAR ISI

No	Penulis/Artikel	Hal.
	Amran	
1.	Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Secara Merata Kepada Masyarakat di Gampong Meudang Ara Kec. Nurussalam Kab. Aceh Timur	1
2.	Saifuddin Kredibilitas Pendamping Desa di Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, tulisan ketiga Muammar Khalis menulis tentang Wewenang Camat Di Era Otonomi Khusus Aceh (Studi di Kantor Camat Langsa Kota, Kota Langsa),	9
3.	Muammar Khalis Wewenang Camat Di Era Otonomi Khusus Aceh (Studi di Kantor Camat Langsa Kota, Kota Langsa),	15
4.	Anwar Evaluasi Kebijakan Sensus Kendaraan Bermotor Di Kota Lhokseumawe Tahun 2017	24
5.	Eliadi Peran Tokoh Adat Dan Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Dalam Kasus Sengketa Tapal Batas di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara	31
6.	Nurhaslita Sari Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016	38
7.	Nurbaeti Perencanaan dan Penganggaran Dana Desa Untuk Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Desa Belang Rakal Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2016	46
8.	Mahyana Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Kopi di Kabupaten Aceh Tengah	53
9.	Nor Azira Ayob, Sity Daud dan Rasyidin Modal Insan Dan Sokongan Kerajaan Ke Arah Kejayaan Usahawan Bumiputera: Satu Sorotan	62

WEWENANG CAMAT DI ERA OTONOMI KHUSUS ACEH (STUDI DI KANTOR CAMAT LANGSA KOTA, KOTA LANGSA)

Muammar Khalis¹
Dr. Rasyidin, MA²
M. Akmal, MA³

ABSTRAK

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai penjabaran Pasal 18, membawa berbagai perubahan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Undang-undang ini telah mengubah secara mendasar praktek-praktek pemerintahan, salah satunya adalah menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan. Perubahan tersebut membawa akibat berubahnya bentuk organisasi, pembiayaan, pengisian personil, pemenuhan kebutuhan logistik dan akuntabilitasnya, selain perubahan mengenai definisi Kecamatan itu sendiri. Sebelumnya, Kecamatan merupakan wilayah administratif dalam rangka dekosentrasi yakni lingkungan kerja perangkat pemerintah yang menyelenggarakan pelaksanaan tugas pemerintahan umum di daerah, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 209, yakni Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten atau Kota dalam rangka asas desentralisasi. Menegaskan, apabila dulu dalam kerangka asas dekosentrasi Kecamatan merupakan salah satu wilayah administrasi pemerintahan, baik secara Nasional, Propinsi, Kabupaten dan Kotamadya, maupun Kota Administratif. Namun, pada saat sekarang ini Kecamatan adalah wilayah kerja dari perangkat daerah. Dapat dikatakan pula bahwa Kecamatan bukan merupakan wilayah kekuasaan, akan tetapi Kecamatan adalah wilayah pelayanan. diperoleh hasil penelitian bahwa pemerintah Aceh perlu melakukan penguatan dan pengembangan kewenangan kecamatan berbasis keistimewaan dan kekhususan Aceh. Hal ini dapat dilakukan dengan upaya pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota kepada camat sesuai Undang-Undang Pemerintah Aceh.

Kata Kunci: Kewenangan, Otonomi Daerah, Kota Langsa

¹Mahasiswa Program Magister Administrasi Negara FISIP UNIMAL

²Ketua Program Magister Administrasi Negara FISIP UNIMAL

³Dekan FISIP UNIMAL

Pendahuluan

Pembangunan nasional merupakan perwujudan tujuan nasional bangsa Indonesia pada intinya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan nasional yang dilaksanakan pada hakekatnya mencakup semua aspek kehidupan manusia yang dilakukan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan serta menyeluruh keseluruh pelosok tanah air.

Agar pembangunan nasional sesuai dengan sasaran, maka pelaksanaannya dapat diarahkan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kegiatan pembangunannya sendiri. Pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional mencakup seluruh segi kehidupan masyarakat, sudah barang tentu memerlukan pengorganisasian pemerintah yang mampu mengikuti perkembangan zaman.

Pelaksanaan pembangunan yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat. penyelenggaranya dilakukan menyeluruh sampai ke pelosok daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, dengan kata lain bahwa negara memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan. Status kecamatan kini merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang setara dengan dinas dan lembaga teknis daerah bahkan kelurahan, hal ini dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 209 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yakni, "Kecamatan adalah perangkat daerah kabupaten/kota".

Sebagai perangkat daerah, Camat Langsa kota sudah melaksanaan peraturan walikota Langsa Nomor 33 Tahun 2009 tentang pendeklasian sebagian kewenangan walikota kepada camat secara komprehensif. namun bidang kewenangan lainnya pada jenis memungut pengenaan leges belum di laksanakan oleh camat/perangkat kantor camat Langsa kota semenjak Perwal tersebut di delegasiakan kepada para camat dalam wilayah pemerintahan kota langsa. Menurut kamus

bahasa Indonesia leges adalah meterai tempel yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara eksplisit memberikan kewenangan otonomi kepada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota didasarkan pada asas desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup semua bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama.

Dengan rumusan tersebut, maka kepada Daerah diberi peran dan tanggungjawab yang lebih besar untuk memberdayakan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Melalui undang-undang tersebut, simpul-simpul kebijakan telah bergeser dari Pusat dan Propinsi ke Kabupaten/Kota dengan asumsi bahwa pelayanan publik, pembangunan dan pemberdayaan dapat diselenggarakan lebih efektif dan efisien.

Melalui pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat diharapkan memberikan keleluasaan kepada camat untuk bisa lebih mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, yang akan memberikan dampak pada semakin berdayanya kecamatan serta penguatan institusi kecamatan. Semakin dekat pelayanan kepada publik, maka pemberian pelayanan kepada masyarakat akan lebih cepat, tepat dan efisien, sehingga masyarakat dapat menghemat tenaga, biaya serta waktu karena tidak lagi harus ke kabupaten untuk mengurus keperluan maupun kepentingannya.

Upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pelimpahan kewenangan tersebut, secara bertahap diharapkan akan merubah paradigma pelayanan publik ditingkat lokal dan merubah citra pelayanan pemerintah yang diannggap terlalu birokratis, kaku dan lamban di mata publik selama ini. Pelayanan publik yang lebih dekat dan lebih baik diharapkan akan menciptakan kepuasan masyarakat yang selanjutnya akan memberikan dampak pada aspek ekonomi dan sosial politik yang kuat kepada pemerintah daerah.

Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan jika dibandingkan

dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio-kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketentraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integrasi kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi utama camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah.

Aceh memiliki keleluasaan untuk mengatur kelembagaan pada pemerintahannya sesuai dengan kekhususan yang dimiliki. sejak berlakunya otonomi khusus, belum ada regulasi khusus yang mengatur pelaksanaan kewenangan kecamatan di Aceh. sehingga pelaksanaannya mengacu pada aturan nasional yang berlaku bagi seluruh kecamatan di Indonesia. kekhususan yang dimiliki tidak menjadikan kecamatan di Aceh berbeda dengan kecamatan lainnya di Indonesia.

Adanya UUPA berarti Aceh memiliki peluang untuk memformulasikan kembali posisi kecamatan sesuai dengan karakter khas yang dimiliki daerah. Peluang tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Qanun Aceh, peraturan gubernur dan peraturan bupati yang dapat menegaskan kewenangan yang dimiliki kecamatan sesuai dengan UUPA juga penegasan kewenangan kecamatan bahwa di samping perangkat daerah kabupaten/kota, kecamatan juga sebagai wilayah pelaksanaan otonomi khusus Aceh. Pemerintah Aceh perlu melihat peran strategis kecamatan dengan meningkatkan kewenangan kecamatan. Sehingga mampu mengembangkan kinerja pelayanan publik untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan di tingkat kecamatan. upaya ini akan menimbulkan efek berganda dan pada ujungnya keberhasilan pembangunan di setiap kecamatan secara kolektif akan menjadi keberhasilan pembangunan kabupaten/kota serta provinsi secara keseluruhan.

Sebagai implementasi kebijakan otonomi daerah maka pemerintahan Kota Langsa telah melakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan, maka melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001

tentang Pembentukan Kota Langsa, pemerintah Kota Langsa menetapkan pembentukan beberapa wilayah kecamatan, terdiri dari Kecamatan Langsa Kota, Kecamatan Langsa Timur dan Kecamatan Langsa Barat.

Selanjutnya Kota Langsa dikembangkan dengan lahirnya 2 kecamatan baru yaitu kecamatan Langsa Lama dan Kecamatan Langsa Baro sesuai dengan Qanun Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2007 tentang pembentukan kecamatan langsa lama dan kecamatan langsa baro sehingga saat ini jumlah kecamatan pada pemerintah Kota Langsa menjadi 5 (lima) kecamatan, dengan harapan dapat mempermudah tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Kota Langsa dalam melaksanakan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cara mempersiapkan sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana.

Berdasarkan Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Gampong-Gampong Dalam Kota Langsa, untuk wilayah kecamatan Langsa Kota terdiri dari 10 gampong yang secara rinci gampong-gampong di wilayah kecamatan Langsa.

Berdasarkan registrasi data penduduk pada tahun 2016 jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Langsa Kota adalah 41.070 jiwa, yang terdiri dari 20.262 laki-laki dan 20.808 perempuan, dan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai pedagang, buruh harian dan pegawai negeri sipil.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah Pasal 225 Ayat 1 Huruf d dan peraturan walikota langsa Nomor 33 Tahun 2009 Tentang pelimpahan sebagian kewenangan walikota kepada camat pada bagian ketiga bidang koordinasi Pasal 4 Ayat 2 Huruf c, maka dari hasil pengamatan awal oleh penulis pada kantor camat langsa kota terdapat kewenangan yang belum optimal di laksanakan oleh camat langsa kota adalah Pengkoordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum.

Hal tersebut dalam pengamatan penulis di mana camat melihat pelimpahan dari walikota lebih cenderung menjadi tugas, pokok dan fungsi instansi terkait yang lebih berperan melaksanakannya sehingga camat melaksanakan tugas lainnya di banding

dalam pengkoordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana camat melaksanakan kewenangan yang didelegasikan dari walikota khususnya pada kewenangan memungut pengenaan leges?
2. Apa hambatan camat dalam melaksanakan kewenangan khususnya hambatan pada kewenangan lainnya pada jenis memungut pengenaan leges sesuai Peraturan Walkota Langsa Nomor 33 Tahun 2009?

Landasan Teori

Teori merupakan landasan yang teramat penting dalam memahami, menafsirkan dan memaknai data, oleh karena itu untuk memudahkan penafsiran data dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teori sebagai berikut:

Pelimpahan/ Wewenang

Pelimpahan wewenang adalah proses pengalihan tugas kepada orang lain yang sah atau terlegitimasi (menurut mekanisme tertentu dalam organisasi) dalam melakukan berbagai aktifitas yang ditujukan untuk mencapai tujuan organisasi yang jika dilimpahkan akan menghabat proses pencapaian tujuan tersebut.

Pendegelasian adalah suatu pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

Menurut Manullang (1988 : 32), Kegiatan seseorang untuk menugaskan stafnya/bawahannya untuk melaksanakan bagian dari tugas pimpinan yang bersangkutan dan pada waktu bersamaan memberikan kekuasaan kepada staf/bawahan tersebut, sehingga bawahan itu dapat melaksanakan tugas-tugas itu sebaik baiknya serta dapat mempertanggung jawabkan hal-hal yang didelegasikan kepadanya.

Pemerintahan

Dalam ilmu pemerintahan dikenal adanya dua definisi/arti pemerintah yakni dalam arti sempit dan arti luas, dalam arti

luas pemerintah didefinisikan sebagai Suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan, sedangkan dalam arti sempit didefinisikan sebagai Suatu badan persekumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, menjalankan manajemen, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan.

Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerintah memiliki arti sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola sistem pemerintah dan menetapkan kebijakan untuk mencapai tujuan negara.

Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang demokratis, dan berlandaskan pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Indonesia menjalankan pemerintahan republik presidensial dan dengan sistem politik didasarkan pada Tria Politika yakni kekuasaan Legislatif bertugas membuat undang-undang, Eksekutif bertugas menerapkan atau melaksanakan undang-undang, dan Yudikatif bertugas mempertahankan pelaksanaan undang-undang. Untuk kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh pemerintah dan dikepalai oleh seorang presiden yang dipilih melalui pemilihan umum secara langsung oleh masyarakat. dalam penyelenggaraan pemerintah, presiden dibantu beberapa menteri yang tergabung dalam suatu kabinet.

Otonomi Khusus

Pembahasan tentang otonomi khusus perlu diawali dengan pembahasan tentang pengertian pemerintah daerah dan desentralisasi. Pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat kabupaten/kota menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimasud dalam Undang-undang dasar Negara republik

Indonesia tahun 1945 sedangkan pemerintah daerah adalah sebagai unsur penyelengara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi dewan perwakilan rakyat kabupaten kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelengara pemerintahan daerah.

Selanjutnya pemerintahan Aceh adalah pemerintah daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan undang undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Aceh dan dewan perwakilan rakyat daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

Salah satu alasan pemerintah Indonesia memberikan pengakuan kekhususan di Aceh tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh pada huruf c di sebutkan bahwa "ketahanan dan daya juang yang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berdasarkan syariat islam yang melahirkan budaya islam yang kuat sehingga Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan republik Indonesia". Selanjutnya undang undang nomor 11 tahun 2006 Tentang pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa pemerintahan kabupaten/kota adalah penyelengara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten kota dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

Sejalan dengan otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan daerah yang lebih luas dalam menentukan kebijakan dan program pembangunan yang baik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah masing-masing dalam peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 Tentang urusan tenang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pasal 6 ayat 2di sebutkan bahwa "urusan pemerintahan terdiri

atas urusan wajib dan urusan pilihan". Latar belakang demografi, geografi, ketersediaan infrastruktur dan budaya yang tidak sama, serta kapasitas sumber daya yang berbeda, memiliki konsensiensi adanya keberagaman kinerja daerah dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembangunan.

Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, pasal 7 menyebutkan bahwa terdapat beberapa urusan pemerintahan yang wajib diselelygarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam kaitannya dengan pelayanan dasar. urusan wajib tersebut meliputi 26 poin/bidang (poin a sampai dengan z). Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas yang menjadi urusan wajib maupun urusan pilihannya memiliki keinginan yang kuat untuk menundukan masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subyek guna mengembangkan kemandirianya.

Otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, terutama perubahan secara struktur organisasi dalam tatanan penyelenggaraan pemerintah untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari badan-badan/lembaga teknis daerah dan satuan kerja perangkat daerah. Salah satu perangkat daerah yang merupakan unsur pelayanan langsung kepada masyarakat adalah kecamatan yang melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang dari bupati langsung di wilayah kerjanya.

Otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diberikan kepada daerah 'tertentu' untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri tetapi sesuai dengan hak dan aspirasi masyarakat di daerah tersebut.

Kewenangan ini diberikan agar daerah ‘tertentu’ dapat menata daerah dan bagian dari daerah tersebut agar lebih baik lagi di bidang tertentu sesuai dengan aspirasi daerahnya.

Otonomi khusus ditawarkan melebihi otonomi daerah biasa, karena otonomi ini diberikan kepada daerah ‘tertentu’ yang berarti daerah tersebut mempunyai kelompok gerakan kemerdekaan yang ingin memisahkan dirinya (daerahnya) dari wilayah NKRI. Jadi secara tidak langsung, pemerintah memberikan otonomi khusus ini sebagai bentuk pendekatan damai agar kelompok gerakan tersebut tidak terus bergejolak.

Butuh pertimbangan yang sangat matang untuk memberikan otonomi khusus kepada daerah ‘tertentu’ ini. Karena suatu negara sangat bergantung pada pendapatan daerah ‘tertentu’ yang akan diberikan otonomi khusus. Diperlukan beberapa kesepakatan agar kedua pihak (negara yang memberikan otsus dan daerah ‘tertentu’ yang menerima otsus) akan sama-sama diuntungkan dengan adanya otonomi khusus ini. Karena setiap bangsa atau negara memerlukan kemajuan yang relatif meningkat untuk melaksanakan proses berkembangnya negara menuju kondisi yang lebih baik.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, karena persoalannya sangat komprehensif, mendalam dan sangat luas. Kolektif data dilakukan dengan menelaah dokumentasi baik yang bersumber pada buku, jurnal dan undang-undang yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu tentang wewenang.

Hasil Penelitian

Sistem penyelenggaraan di Aceh, kecamatan diatur dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh. Menurut Pasal 1 Ayat 18 Ketentuan Umum Undang-undang Pemerintahan Aceh, kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

Dalam pelaksanaannya, kewenangan kecamatan terdiri dari dua yaitu atributif dan delegatif. Menurut Wasistiono (2009: 59), Kewenangan atributif berarti kewenangan yang

melekat dan diberikan kepada suatu institusi atau pejabat berdasarkan peraturan perundang-undangan, sedangkan kewenangan delegatif adalah kewenangan yang berasal dari pendelegasian institusi atau pejabat yang lebih tinggi tingkatannya.

112 Ayat 3 Undang-undang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa camat memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota untuk menangani urusan pemerintahan. Hal ini berarti camat menyelenggarakan kewenangan delegatif. Pasal selanjutnya camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Hal ini berarti camat juga menyelenggarakan kewenangan atributif, meliputi:

- Menyelenggarakan kegiatan pemerintahan pada tingkat kecamatan;
- Membina penyelenggaraan pemerintahan mukim, kelurahan, dan gampong;
- Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan mukim, kelurahan, dan gampong;
- Mengordinasikan;
- Kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; dan
- Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Adapun hambatan camat dalam melaksanakan kewenangan yang didelegasikan dari walikota adalah:

- Ketidak pahaman Camat Langsa Kota didalam menelaah dan menindaklanjuti butir-butir isi-isu dari pasal pada Peraturan Walikota Langsa Nomor 33 Tahun 2009 Tentang pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat sehingga bidang kewenangan lainnya pada jenis memungut Pengenaan Leges belum dilaksanakan.
- Pada level perangkat kecamatan terutama pejabat struktural dan staf adanya faktor tidak mengerti dan tidak mengetahui adanya kewenangan yang didelegasikan Walikota Langsa yang seharusnya dilaksanakan oleh pihak kecamatan namun saat dilakukan penelitian jenis memungut Pengenaan

Leges tidak dilaksanakan oleh pihak Kecamatan Langsa Kota.

Data yang di dapatkan berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa camat dan perangkat kecamatan dalam melaksanakan peraturan walikota langsa Nomor 33 Tahun 2009 masih belum optimal, ini terlihat adanya kewenangan yang masih belum berjalan terutama pada jenis memungut Pengenaan Leges, walaupun peraturan walikota langsa telah disahkan pada tahun 2009.

Tujuan dan manfaat pelimpahan wewenang yaitu untuk mempercepat pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga program pemberdayaan masyarakat pun dapat cepat diimplementasikan, mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat sehingga pelayanan menjadi lebih berkualitas, mempersempit rentang kendali dari Bupati kepada Desa atau Lurah, kaderisasi kepemimpinan pemerintahan.

Menurut penulis hambatan Camat belum melaksanakan kewenangan yang didelegasikan oleh Walikota pada jenis memungut Pengenaan Leges adalah:

- Kurangnya sosialisasi dari bagian tata pemerintahan Sekda Kota Langsa terhadap Peraturan Walikota Langsa Nomor 33 Tahun 2009 Tentang pelimpahan sebagian kewenangan walikota kepada camat sehingga ada poin-poin yang belum berjalan secara optimal.
- Kurangnya komunikasi Aparatur Kecamatan Langsa Kota dengan pihak eksekutif untuk melaksanakan Perwal tersebut.
- Kurangnya keinginan untuk memahami isi Peraturan Walikota Langsa Nomor 33 Tahun 2009 Tentang pelimpahan sebagian kewenangan walikota kepada camat bagi perangkat kecamatan terhadap isi dari setiap pasal.

Dari amatan peneliti, maka agar hambatan tersebut teratas dapat di tempuh cara-cara sebagai berikut :

- Adanya sosialisasi Peraturan Walikota Langsa Nomor 33 Tahun 2009 Tentang pelimpahan sebagian kewenangan walikota kepada camat terhadap pihak

Aparatur Kecamatan Langsa Kota dari Bagian Tata Pemerintahan Sekda Kolta Langsa.

- Pihak Aparatur Kecamatan melakukan koordinasi dan komunikasi pada Dinas Badan Lembaga Teknis Daerah, bagian-bagian kewenangan apa saja yang dapat didelegasikan kepada pihak kecamatan.

Kurangnya sosialisasi peraturan walikota kepada camat dan perangkat kecamatan dalam wilayah kota langsa terhadap pelimpahan kewenangan walikota kepada camat, A. Rahman H.I (2007: 103). sosialisasi politik adalah proses yang melalui dalam masyarakat tertentu belajar mengenai sistem politiknya. hal ini sebagai upaya menciptakan dan memperjuangkan kepentingan umum.

Dalam hal pelimpahan wewenang Walikota kepada camat terdapat beberapa prosedur yang akan dilakukan antara lain: Melakukan inventarisasi bagian-bagian kewenangan dari Dinas dan atau lembaga teknis daerah yang dapat didelegasikan kepada Camat, Mengadakan rapat teknis antara Pimpinan Dinas Daerah dan atau lembaga teknis daerah dengan Camat, Menghitung perkiraan anggaran, Menyiapkan tolok ukur kinerja organisasi Kecamatan. Dalam konteks Sri Wahyuningsih, (2011: 27) berpendapat bahwa mekanisme pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat yaitu :

- Melakukan inventarisasi bagian-bagian kewenangan dari Dinas dan atau lembaga teknis daerah yang dapat didelegasikan kepada Camat melalui pengisian daftar isian;
- Mengadakan rapat teknis antara pimpinan dinas daerah dan atau lembaga teknis daerah dengan Camat untuk mencocokkan bagian-bagian kewenangan yang dapat didelegasikan dan mampu dilaksanakan oleh Camat;
- Menyiapkan rancangan keputusan Bupati/Walikota untuk dijadikan keputusan;
- Menata ulang organisasi Kecamatan sesuai dengan besaran dan luasnya kewenangan yang didelegasikan untuk masing-masing Kecamatan;

- Mengisi organisasi dengan orang-orang yang sesuai kebutuhan dan kompetensinya, apabila perlu diadakan pelatihan teknis fungsional sesuai kebutuhan;
- Menghitung perkiraan anggaran untuk masing-masing kecamatan sesuai dengan beban tugas dan kewenangannya, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah bersangkutan;
- Menghitung perkiraan kebutuhan logistik untuk masing-masing Kecamatan; dan Menyiapkan tolok ukur kinerja organisasi Kecamatan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menarik kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pelimpahan walikota kepada camat sudah dilakukan secara komprehensif oleh camat dan perangkat kecamatan Langsa kota sesuai dengan peraturan walikota Langsa Nomor 33 Tahun 2009 Tentang pelimpahan sebagian kewenangan walikota kepada camat, Namun dalam implementasinya ada bidang kewenangan lainnya pada jenis memungut pengenaan leges yang belum dilaksanakan oleh camat beserta perangkat kecamatan pada kantor camat Langsa kota.
2. Camat beserta perangkat kecamatan Langsa kota tidak menelaah atau adanya ketidak pahaman isi dari pasal pada peraturan walikota Langsa Nomor 33 Tahun 2009 Tentang pelimpahan sebagian kewenangan walikota kepada camat sehingga jenis kewenangan memungut pengenaan leges tidak dilaksanakan sehingga kebijakan tersebut tidak optimal.

Daftar Pustaka

Koswara E. 2001. *Teori Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Institut Ilmu Pemerintahan Press.

Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT Refika Aditama.

Syarbaini Syahrial, dkk. 2002. *Sosiologi dan Politik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Wasistono Sadu, dkk. 2009. *Perkembangan Organisasi Kecamatan dari Masa ke Masa*. Bandung: Fokus Media.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang *Otonomi Daerah*.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 Tentang *Pembentukan Kota Langsa*.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang *Otonomi khusus Aceh*.

MODAL INSAN DAN SOKONGAN KERAJAAN KE ARAH KEJAYAAN USAHAWAN BUMIPUTERA: SATU SOROTAN

Nor Azira Ayob¹
Sity Daud²
Rasyidin³

ABSTRAK

Artikel sorotan ini bertujuan mengupas pendekatan terbaik yang digunakan untuk pembangunan modal insan yang cemerlang dalam kalangan pengusaha Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) dan peranan kerajaan ke arah kejayaan usahawan bumiputera. Program pembangunan modal insan dalam keusahawanan, merupakan usaha dan pelaburan Kerajaan ke arah meningkatkan kemahiran teknikal, kreativiti dan inovasi sumber manusia bagi memacu ekonomi berasaskan pengetahuan dan daya saing. Kerajaan sentiasa berusaha dengan menggubal pelbagai dasar dan sokongan seperti menubuhkan agensi-agensi yang dipertanggungjawabkan untuk membantu golongan bumiputera untuk berjaya dan berdaya saing. Peranan yang diberikan oleh kerajaan adalah merangkumi pelbagai jenis bantuan sama ada dalam bentuk kewangan dan bukan kewangan untuk pembangunan modal insan. Lantaran itu, dalam meningkatkan modal insan, ilmu pengetahuan dan kemahiran yang secukupnya adalah perlu dalam membangunkan modal insan yang cemerlang. Pembangunan modal insan didefinisikan sebagai suatu carauntuk mengenal dan mengategorikan kemahiran dan kebolehan seseorang untuk pembangunan diri, keluarga, masyarakat dan pembangunan negara. Tumpuan kepada pembangunan sumber manusia dari sudut pengetahuan dan kemahiran adalah sangat penting dan dapat menyumbang kepada pertumbuhan dan pembangunan masyarakat dan ekonomi sesebuah negara. Begitu juga dalam aktiviti keusahawanan di mana dengan penekanan kepada aspek modal insan mampu meningkatkan prestasi dan kejayaan usahawan berskala kecil dan sederhana.

Kata Kunci: Modal Insan; Sokongan Kerajaan; Usahawan Bumiputera; Pengetahuan dan Kemahiran; Perusahaan Kecil dan Sederhana

¹Dosen Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi MARA (Ui TM) Seremban 3, Negeri Sembilan, Malaysia

²Dosen Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia, 46300 UKM, Bangi, Selangor, Malaysia

³Ketua Program Magister Administrasi Publik (PM-AP), Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe

Pengenalan

Kajian keusahawanan merupakan bidang yang sangat dititikberatkan oleh pihak kerajaan dengan pelbagai dasar sokongan diberikan melalui agensi kerajaan untuk membangunkan modal insan dalam kalangan pengusaha bumiputera. Sebagai sebuah negara yang pesat membangun, kerajaan berusaha untuk menaikkan taraf kehidupan dan ekonomi rakyatnya terutama kaum Bumiputera. Suatu strategi dan dasar pembangunan berdasarkan objektif perpaduan nasional telah diwujudkan seperti Dasar Ekonomi Baru (DEB) di bawah pimpinan Tun Abdul Razak. Rancangan-rancangan pembangunan di bawah DEB adalah disusun dan dijalankan menerusi strategi serampang dua mata iaitu mengurang dan seterusnya membasmi kemiskinan dengan memperbanyakkan peluang-peluang pekerjaan kepada semua rakyat tanpa mengira kaum dan penyusunan semula masyarakat untuk mengurangkan dan seterusnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi. Bagi meningkatkan aktiviti keusahawanan dalam kalangan bumiputera, Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB) telah dirangka dalam objektif kedua DEB di mana kerajaan berusaha untuk menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi dan seterusnya menghapuskan stereotaip kaum Melayu di kampung dan menjalankan aktiviti pertanian dan nelayan kecil, kaum Cina di bandar dan menjalankan aktiviti perniagaan dan perusahaan serta kaum India di kawasan estet dan menjadi buruh kasar (Sity 2004; 2003).

Melalui dasar ini, kerajaan berusaha untuk mempercepatkan proses penyusunan semula masyarakat Malaysia untuk memperbetulkan ketidakseimbangan landskap ekonomi supaya dapat mengurangkan dan seterusnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi. Peluang yang dibuka kepada kaum bukan bumiputera juga menyebabkan golongan ini turut menyokong pembentukan DEB ke arah pembangunan negara. Kerajaan berusaha untuk memastikan kaum bumiputera mampu untuk berjaya dan menambahkan penyertaan dalam semua

sektor terutamanya dalam bidang ekonomi, politik, pentadbiran dan sosial khususnya dalam bidang keusahawanan. Sehubungan dengan itu, bagi membangunkan ekonomi bumiputera, Kerajaan telah memperkenalkan pelbagai dasar dan program sokongan supaya dapat bersaing dengan kaum lain terutamanya dalam bidang ekonomi (Sity 2004; 2003). Kerajaan berusaha dengan memperkenalkan perniagaan berbentuk PKS bagi memastikan kaum bumiputera melibatkan diri dalam aktiviti ekonomi dan keusahawanan. Seterusnya, mampu meningkatkan pendapatan keluarga dan mengurangkan kemiskinan dalam kalangan kaum bumiputera dengan memberi penekanan kepada pembangunan modal insan.

Jabatan Penerangan Malaysia (2006) mendefinisikan modal insan sebagai individu yang berilmu, berkeyakinan, mempunyai nilai murni dan moral yang tinggi, beretika, berbudi pekerti, bersopan-santun, berdisiplin, dinamik, inovatif, kreatif, sihat, bersemangat patriotik, adil, progresif, cekal dan berdaya saing. Justeru ia adalah selari dengan definisi usahawan di mana seorang usahawan yang berjaya dan cemerlang adalah perlu memiliki daya kreativiti yang tinggi, daya berinovasi, beretika, bersemangat dan sanggup menanggung risiko (Ab Aziz 2010). Manakala, pembangunan modal insan merupakan suatu proses bertujuan untuk melahirkan jiwa yang bertakwa. Ketiadaan jiwa yang bertakwa akan mengakibatkan fungsi akal dan fizikal menjadi lumpuh (Ismahdi 2008). Justeru, merujuk kepada definisi pembangunan modal insan, dapat disimpulkan bahawa modal insan adalah merujuk kepada individu atau manusia yang boleh di bentuk dan dibangunkan untuk manfaat diri, masyarakat dan negara.

Dalam aktiviti pembangunan seperti PKS, kerajaan adalah berperanan penting di dalam menyokong perkembangan dan pembangunan. Menurut Christ & Green (2004); Eshima (2003); Sarder et al. (1997) dan Petrof (1980), peranan kerajaan merupakan faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan dan prestasi PKS. Namun begitu, pelaksanaan dasar untuk pembangunan sektor PKS ini adalah

bergantung pada faktor politik dalam sesebuah negara (Kjellman et al 2004 dan Lauder et al. 1994). Dasar kerajaan terhadap pembangunan PKS wujud dalam bentuk bantuan dan sokongan. Justeru, dalam konteks ini, Sarder et al. (1997) menyatakan khidmat sokongan kerajaan merupakan sebarang jenis bantuan dan sokongan sama ada dalam bentuk kewangan atau bukan kewangan yang di sediakan oleh kerajaan bagi memastikan perkembangan sektor PKS. Menurut Berko & Gueullette (2003) strategi khusus perlu dilakukan oleh pihak kerajaan bagi meningkatkan perkembangan ekonomi dan menggalakkan aktiviti keusahawanan dalam masyarakat. Keadaan ini dilakukan melalui tiga aspek iaitu pembangunan modal insan, pembangunan institusi dan penambahbaikan perkhidmatan ekonomi. Bentuk-bentuk sokongan yang diberikan adalah dalam bentuk program latihan, bantuan kewangan, bantuan bukan kewangan, pembentukan jaringan perniagaan dan pengurusan serta kawalan kualiti (RosmanMahmood& MohdRosli 2011; Berko & Gueullette 2003).

Konsep Modal Insan

Pencetus dan perintis istilah modal insan boleh dijejaskan seawal tahun 1958 oleh Jacob Mincer. Asas teori modal insan yang dikemukakan adalah mengenai faedah atau kelebihan sesuatu pelaburan dalam pendidikan untuk meningkatkan pengeluaran khususnya dalam bidang pertanian. Secara umumnya, teori ini menjelaskan faedah yang akan diperoleh hasil daripada pelaburan modal insan yang dapat meningkatkan prestasi dan produktiviti sesebuah organisasi di samping kejayaan individu tersebut.

Blaug (1976) menyatakan istilah insan digunakan kerana ia menonjolkan jatidiri manusia itu sendiri. Manakala istilah modal adalah kerana ia (iaitu manusia) adalah sumber kepuasan dan pulangan keuntungan akan datang (*future satisfactions and future earnings*). Nilai modal insan akan mencorakkan hala tuju negara ke arah wawasan yang disasarkan. Tanpa modal insan yang berkualiti, sesebuah negara akan lemah kerana ketiadaan faktor manusia yang menjadi pencetus kepada inisiatif baru dalam

kegiatan sosio-ekonominya (Muhammad Hisham 2005). AiniJaafar (2006) menjelaskan modal insan merupakan suatu istilah yang menggambarkan ianya daripada fahaman kapitalisme yang melihat manusia sebagai buruh dan pengusaha. Dengan itu, manusia dilihat sebagai suatu jenis 'modal' dan dinamakan sebagai modal insan, iaitu sebagai suatu aset tenaga yang penting dan bermakna kepada kegiatan ekonomi, pembangunan negara, politik, mahupun kemajuan bangsa dan ummah. Modal ini perlu dibangunkan dan diuji bagi menentukan kemampuannya sebelum memanfaatkannya.

Pelaburan dalam modal insan berupaya meningkatkan pendapatan individu dan isi rumah, mengatasi masalah kemiskinan dan sekaligus mewujudkan keadaan agihan pendapatan yang lebih seimbang (Katz & Murphy 1992; Lynch 1991). Di samping itu, pembentukan modal insan juga turut boleh memberi kesan positif kepada masyarakat dari segi kesan limpahan ilmu pengetahuan yang mewujudkan kesan luaran positif kepada penduduk sesebuah negara. Dalam era liberalisasi dan globalisasi ekonomi yang semakin pesat, tingkat pengetahuan dan kemahiran penduduk boleh mempengaruhi kedudukan daya saing pekerja dan ekonomi sesebuah negara. Justeru, negara perlu membuat pelaburan yang secukupnya untuk membangunkan modal insan bagi menghadapi cabaran dan daya saing di peringkat global.

Pencapaian modal insan merupakan antara faktor penting yang boleh mempengaruhi tingkat pendapatan individu dan boleh mengurangkan masalah agihan pendapatan antara wilayah dan kumpulan masyarakat dalam sesebuah negara. Kemampuan modal insan untuk meningkatkan pendapatan individu telah dijelaskan oleh teori modal manusia yang diperkenalkan oleh Jacob Mincer (1958), Schultz (1960) dan Becker (1964) di mana pelaburan kepada pembangunan modal insan mampu mengekalkan daya saing. Teori ini telah dibuktikan kebenarannya oleh banyak kajian yang menunjukkan terdapat hubungan yang positif antara pencapaian modal insan seseorang dengan tingkat pendapatan mereka (Denison, 1967; Barro, 1990; De Gregario,

1992; Otani & Villanueva, 1993; Hansen & Knowles, 1997; Murthy & Chien, 1997; Baro & Lee, 1996; Pritchett, 1996). Kebanyakan kajian ini bersetuju bahawa pencapaian modal insan, terutamanya pendidikan diberikan dengan saksama, kedudukan agihan pendapatan dalam kalangan masyarakat akan turut bertambah baik.

Fernandez et al. (1999) menyatakan modal insan merupakan faktor utama dalam menentukan daya saing sesebuah perniagaan. Pelaburan di dalam modal insan dilihat memberi impak yang besar ke atas peningkatan produktiviti dan pendapatan masa depan perusahaan yang di jalankan (Bruwer & Haydam 1996). Pada masa kini, pembangunan modal insan menjadi fokus kepada pelbagai pihak seperti pihak kerajaan, institusi, universiti dan firma menerusi pelbagai program latihan (Gracia 2005). Menurut Fernandez et al. (1999), hubungan di antara modal insan dengan latihan dan kesan ke atas prestasi ini dapat dikaitkan dengan teori modal insan. Perkembangan dan aplikasi teori modal insan, khususnya berkaitan dengan perkembangan buruh dan perusahaan adalah sangat menarik untuk di kaji. Asas teori modal insan yang dikemukakan adalah berkaitan dan menjurus kepada faedah atau kelebihan sesuatu pelaburan dalam pendidikan untuk meningkatkan pengeluaran. Secara umumnya, teori ini menjelaskan faedah yang akan diperoleh hasil daripada pelaburan modal insan yang dapat meningkatkan produktiviti dan prestasi sesebuah organisasi (Rosman & Mohd Rosli 2011).

Schultz (1960) telah mengemukakan lima aspek dalam konteks pelaburan modal insan iaitu persekolahan dan pendidikan tinggi, latihan semasa bekerja, migrasi, kesihatan dan maklumat ekonomi. Manakala, Blaug (1976) pula mengklasifikasikan pelaburan modal insan tersebut terbahagi kepada enam kategori iaitu pendidikan formal, latihan semasa bekerja, mencari pekerjaan, mendapat maklumat, migrasi dan penambahbaikan dalam kesihatan. Bruwer & Haydam (1996) menjelaskan bahawa pelaburan modal insan adalah termasuk perbelanjaan ke atas pendidikan

formal, latihan semasa bekerja, mencari pekerjaan dan migrasi geografi. Namun demikian, Hewlett (2002) menyatakan bahawa kebanyakannya pengkaji membincangkan teori tersebut dengan memberi tumpuan kepada pelaburan manusia dalam latihan formal (persekolahan dan pendidikan tinggi) dan latihan tidak formal. Di dalam sesebuah perusahaan, latihan merupakan pelaburan dalam pembangunan modal insan (Fernandez et al. 1999). Kesan sesuatu pelaburan modal insan akan dapat mempengaruhi dan meningkatkan prestasi sesebuah perusahaan (Garcia 2005) khususnya dari segi peningkatan produktiviti dan keuntungan perniagaan (Nedrums & Eriksson 2001; Fernandez et al. 1999).

Terdapat dua jenis latihan yang dititikberatkan dalam pembangunan modal insan iaitu latihan khusus yang mempunyai kaitan dengan bidang kerja dan juga latihan umum yang lebih menyeluruh. Keperluan latihan boleh dikaitkan dengan peningkatan kemahiran dalam bidang pekerjaan dan perusahaan yang dijalankan. Pekerja yang berkemahiran rendah lebih cenderung untuk kurang produktif dan dengan itu diberi ganjaran yang kurang dalam pasaran pekerjaan. Fokus utama dalam pembangunan masyarakat ialah latihan, yang dianggap mampu meningkatkan tahap modal insan dan seterusnya meningkatkan kualiti kehidupan dalam masyarakat. Oleh itu, teori ini sangat penting untuk menghasilkan masyarakat berkemahiran tinggi dan mampu bersaing dalam pencapaian prestasi (Green & Haines 2012).

Berdasarkan kajian oleh Rosman & Mohd Rosli (2011) di samping faktor pendidikan dan latihan, modal insan juga menjelaskan bahawa terdapat hubungan yang positif di antara umur dengan pendapatan. Keadaan ini berlaku di mana para pekerja yang lebih berusia akan memperoleh jumlah pendapatan yang lebih tinggi kerana pengalaman mereka dikaitkan dengan *on-the-job training* (Strober 1990). Faktor-faktor demografi lain yang mempunyai hubungan yang positif dengan prestasi di dalam teori ini adalah pengalaman dan taraf pendidikan. Ini jelas menunjukkan bahawa pengalaman seseorang dalam bidang

yang diceburi seperti bidang keusahawanan mampu meningkatkan modal insan dan bakat seseorang usahawan. Pengalaman seorang pengusaha mampu menjadikan seorang usahawan itu mampu berdaya saing dalam masyarakat dan pengusaha lain (Van Loo & Rocco 2004). Sejak mula manusia mengetahui kepentingan hidup bermasyarakat, bidang keusahawanan telah menjadi tonggak kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sesebuah negara.

Pembangunan modal insan merupakan salah satu agenda utama negara untuk membentuk individu berketrampilan dan berkualiti dalam melahirkan masyarakat yang berdaya saing. Dalam RMK-9 (2006-2010), tumpuan diberikan kepada aspek-aspek pembangunan modal insan dengan memberi penekanan berhubung pertumbuhan ekonomi dan pengagihankekayaan dalam kalangan rakyat. Misi modal insan ini dijalankan adalah untuk membangunkan insan yang berpengetahuan, berkemahiran, inovatif, memiliki nilai jati diri, beretika, mempunyai pendidikan, terlatih dan mempunyai peluang pekerjaan sewajarnya. Pembangunan modal insan bukan sajapenting kepada pertumbuhan individu malahan kepada pertumbuhan masyarakat dan kesan besar kepada pertumbuhan ekonomi negara. Dengan memperkuuhkan modal insan itu sendiri, ia akan menggalakkan peningkatan produktiviti negara, sekali-gus akan menjana pendapatan lebih baik di samping mewujudkan peluang pekerjaan (Baharom,Mohamad&MohamadJohdi 2009).

Sebagai negara yang berusaha ke arah negara maju secara holistik, penekanan kepada aspek pendidikan, latihan, kesihatan, ekonomi dan politik di samping sokongan sosial adalah ditekankan. Dalam perspektif ekonomi politik, aspek yang penting dalam pembangunan modal insan ialah proses pendidikan dan latihan yang dapat meningkatkan produktiviti pekerja. Seterusnya proses ini dapat menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. Hubungan di antara pendidikan dan latihan dengan pertumbuhan ekonomi jelas diterangkan dalam teori modal insan. Mengikut teori ini segala perbelanjaan

yang dikeluarkan bagi tujuan pendidikan dan latihan dianggap sebagai pelaburan terhadap modal insan seterusnya meningkatkan produktiviti dan pendapatan seseorang (Schultz 1960; Becker 1964; Rahmah et al. 2012).

Oleh yang demikian, pembangunan modal insan terutamanya dalam aspek pendidikan, latihan dan kemahiran adalah aspek yang penting untuk ditekankan dan dikaji. Ini adalah kerana, dengan penekanan terhadap aspek-aspek modal insan ini akan mampu meningkatkan modal insan seseorang dan seterusnya memberi manfaat kepada perkembangan dan pembangunan individu, keluarga dan seterusnya kepada masyarakat dan negara umumnya. Lantaran itu, seorang pengusaha tidak akan berjaya sekiranya hanya berlandaskan kepada bakat tanpa ilmu dan kemahiran dan tidak menekankan aspek modal insan.

Kepentingan Modal Insan Dalam PKS

Aset yang dimiliki oleh seseorang merupakan modal insan yang mampu menjadikan seseorang itu lebih cekap, produktif dan berkualiti.

Berbanding di negara Barat, kajian mengenai hubungan antara aspek modal insan dengan prestasi dan kejayaan perusahaan di Malaysia tidak banyak dilakukan secara empirikal (Suhaila 2014; Rosman&MohdRosli 2011; Rahmah 2012). Kebanyakan kajian yang dijalankan adalah tertumpu kepada keperluan latihan serta jenis-jenis program yang diikuti (Bank Negara Malaysia 2006; MohdTaib&Zuraidah 2002), kepentingan program latihan (Mastura et al. 2004), kekerapan mengikuti program latihan (MohdTaib&Zuraidah 2002) dan kecenderungan pengusaha terhadap program latihan yang disediakan (Zaini et al. 1995; Abdullah 1993). Kenyataan ini turut di sokong oleh Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak (2013) apabila beliau menyatakan bahawa perniagaan dan keusahawanan merupakan aktiviti ekonomi terpenting bagi menjana pendapatan dan kekayaan. Walau bagaimanapun, penglibatan bumiputera dalam kegiatan tersebut masih rendah disebabkan terdapat beberapa kekangan yang dihadapi termasuk teknologi pengeluaran yang lapuk, kekurangan akses kepada dana

dan modal serta pasaran produk yang terhad selain faktor modal insan yang masih ketinggalan.

Rahmah et al. (2012) menyatakan bahawa modal insan adalah sama penting dengan modal fizikal dalam menyumbang kepada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi sesebuah negara. Seseorang pengusaha yang lebih berpendidikan merupakan aset yang penting kepada sesebuah negara kerana ia mampu menyumbang kepada pertumbuhan output dan prestasi perusahaan. Selain itu, mampu mengadaptasikan teknologi dengan lebih mudah, mencetuskan idea baru, lebih berinovasi dan mengaplikasikan pengetahuan dengan lebih pantas. Mereka mempunyai kebolehan untuk belajar, berfikiran luas, fleksibel dan mempunyai kebolehan untuk menerima sesuatu perubahan atau pembaharuan. Justeru, pendidikan adalah penting dan perlu di tekankan untuk pembangunan insan seseorang.

Pendidikan merupakan salah satu ciri modal insan yang dilihat mempunyai hubungan dengan kejayaan seseorang pengusaha dan mampu meningkatkan prestasi perniagaan oleh kebanyakan penyelidik. Menurut Coulter (2003), semakin tinggi tahap pendidikan yang dimiliki oleh seseorang pengusaha, semakin cenderung seseorang itu melibatkan diri dalam bidang keusahawanan dan semakin tinggi tahap kejayaan yang akan dicapai (Hisrich & Brush 1984; Cooper et al. 1994 dan Mengistae (2006). Tahap pendidikan yang tinggi bukan sahaja dapat meningkatkan kemampuan untuk merangka strategi perniagaan dan membuat keputusan, malah mendapat kepercayaan yang tinggi daripada institusi kewangan untuk memberi pinjaman modal serta dapat mengekalkan operasinya (Bates 1990). Pandangan ini disokong oleh kajian Osirim (1990) yang menyatakan dengan pendidikan yang baik memberi kepercayaan kepada institusi kewangan dalam memberikan bantuan kewangan yang banyak. Hubungan positif antara tahap pendidikan dengan kejayaan seseorang pengusaha telah dijelaskan oleh Rosman&MohdRosli (2011), Mengistae (2006), Abu Bakar & Ikhsan (2003); Fisher et al. (1993), Brush & Hisrich

(1991), Birley&Westhead (1990) dan Cuba et al. (1983).

Lantaran itu, pendidikan memainkan peranan utama dalam memperkembangkan potensi individu dan meningkatkan modal insan dalam kalangan manusia. Setiap potensi individu boleh berkembang ke tahap cemerlang sekiranya dia beri peluang secukupnya. Justeru, peranan kerajaan dalam membantu meningkatkan daya saing rakyat amat dititikberatkan. Tumpuan ditekankan kepada aspek pendidikan dan bermula dari pendidikan rendah sehingga peringkat tertinggi dengan memberi dan menerapkan aspek keusahawanan dalam kalangan pelajar agar mampu menjadi usahawan dan insan yang cemerlang dan berdaya saing. Abu Bakar & Ikhsan (2003) menyatakan bahawa pendidikan mampu melahirkan individu berilmu, mulia, berbudi pekerti yang tinggi, sopan, bertanggungjawab, berketerampilan dan sebagainya yang secara umumnya bersifat positif. Pertumbuhan dan perkembangan yang berlaku ke atas individu lahir hasil daripada proses pendidikan melibatkan intelek, rohani, emosi dan jasmani.

Dalam usaha kerajaan untuk memperkasakan modal insan di negara ini, aspek pendidikan dan latihan merupakan asas kejayaan ke arah pembangunan modal insan yang cemerlang. Menurut Aidit (2008) pelaburan dari aspek pendidikan dan latihan merupakan pelaburan yang amat penting terhadap sumber manusia. Ini adalah kerana seseorang manusia tidak akan dapat menggunakan potensi yang ada pada dirinya dengan semaksimum mungkin sekiranya ia tidak digilap dan diberi pendedahan sewajarnya. Melalui pendidikan dan latihan, bukan sahaja potensi yang ada pada diri seseorang dapat dibangunkan bahkan pengetahuan dan kemahiran-kemahiran lain juga dapat diserapkan secara tidak langsung. Aspek latihan adalah tergolong dalam kategori pendidikan. Konsep latihan amat popular dalam program-program pembangunan modal insan di dalam organisasi.

Program latihan merupakan strategi perniagaan yang sangat penting kepada sesebuah perusahaan kecil bagi

meningkatkan kemampuan bersaing (Webster et al. 2005). Sumber modal insan yang mempunyai ciri-ciri seperti kemahiran, pengetahuan dan sikap yang berdaya saing merupakan elemen terpenting dalam pengurusan perniagaan bagi mewujudkan kecekapan dan kelebihan berdaya saing dalam pasaran. Mengikut teori modal insan, ciri-ciri daya saing yang tinggi dan berkemahiran dalam kalangan usahawan dapat di bentuk menerusi program latihan kerana dapat meningkatkan produktiviti pekerja (Garcia 2005 & Bruwer & Haydam 1996) dan seterusnya memberi kesan positif ke atas prestasi perusahaan (Webster et al. 2005 & Simpson et al. 2004).

Noor Zalika (2013) dalam kajian beliau menyatakan sebanyak 92 peratus usahawan Bumiputera merasakan latihan keusahawanan adalah penting, dan mereka telah mula sedar akan kepentingan sesuatu kemahiran tertentu maka adalah lebih baik sekiranya mereka diberi peluang sewajarnya untuk mengikuti program latihan dan pembangunan usahawan yang sempurna. Program latihan itu perlulah bukan sekadar pendedahan sahaja tetapi mempelajari selok-beloknya. Program latihan keusahawanan ini perlu diubahsuai pelaksanaannya seperti menggunakan kaedah berbentuk pengalaman dan berorientasikan tindakan untuk menepati keperluan dan kehendak spesifik usahawan bagi menjadikan seseorang itu bertambah maju dan tidak ketinggalan dalam segala bidang.

Pencapaian modal insan dalam PKS dengan menerapkan aspek pendidikan dan latihan memainkan peranan penting dalam menentukan prestasi sesebuah perusahaan seperti output, produktiviti dan keuntungan (Barrell & Cornel, 2001). Hubungan antara modal insan dengan produktiviti dan prestasi perusahaan adalah bergantung pada pengurusan firma yang cekap. Bagi industri yang kukuh, manfaat latihan lebih mudah diraih berbanding industri bersifat PKS. Dapatkan kajian yang dijalankan oleh Rahmah (2009) menyatakan bahawa modal insan dalam bentuk bilangan pekerja yang menghadiri latihan tidak menyumbang secara signifikan kepada produktiviti pekerja. Malah, bagi firma bersaiz kecil dan sederhana

didapati bilangan usahawan yang menghadiri latihan telah menurunkan produktiviti mereka. Ini adalah kerana bagi firma yang bersaiz kecil ini mereka berkemungkinan tidak memerlukan latihan kerana beroperasi pada teknologi yang rendah.

Bagaimanapun, kajian Rahmah (2012) mendapati wujud hubungan yang positif di antara prestasi dengan peratus pekerja yang memiliki tahap pendidikan tinggi dan pekerja yang menghadiri latihan, namun hubungannya adalah berbeza mengikut jenis industri. Kajian oleh Mengistae (2006) ke atas 190 perusahaan kecil dalam pelbagai sektor terhadap hubungan tahap pendidikan dengan kejayaan prestasi perusahaan yang diukur bagi tempoh tiga tahun pengalaman perniagaan mendapati hasil daripada analisis korelasi menjelaskan tahap pendidikan mempunyai hubungan yang positif dengan kejayaan pengusaha dan firma. Semakin tinggi tahap pendidikan yang dimiliki oleh pengusaha, semakin tinggi juga kadar pertumbuhan perusahaan yang diusahakan. Kajian ini juga mendapati kadar pertumbuhan perniagaan akan berkembang satu peratus lebih cepat untuk setiap tambahan tahun pendidikan yang dimiliki oleh pengusaha perusahaan kecil. Pengkaji juga mendapati pengusaha yang memiliki tahap pendidikan yang tinggi akan lebih berjaya daripada pengusaha yang mendapat tahap pendidikan sehingga peringkat sekolah rendah sahaja. Kaedah yang sama dijelaskan oleh McPherson (1996) dalam kajian mengenai perkembangan perniagaan mikro dan kecil. Menerusi analisis korelasi, kajian mendapati tahap pendidikan mempunyai hubungan yang positif dan signifikan dengan kejayaan prestasi perusahaan. Perusahaan yang dijalankan oleh pengusaha yang memiliki tahap pendidikan sehingga tamat sekolah menengah menunjukkan perkembangan yang lebih cepat berbanding mereka yang hanya memiliki kelayakan sekolah rendah sahaja.

Bagi melihat hubungan faktor tahap pendidikan dengan kejayaan perusahaan, Mohd Taib & Zuraidah (2002) membuat kajian ke atas 952 orang usahawan bumiputera PKS dari pelbagai sektor yang berdaftar dengan Majlis Amanah Rakyat (MARA) dan

SMIDEC. Kejayaan perniagaan adalah diukur berdasarkan syarikat yang mempunyai pekerja lebih daripada 20 orang dan beroperasi lebih daripada 10 tahun. Menerusi analisis perbandingan yang dilakukan, kajian mendapati majoriti (53.3 peratus) usahawan berjaya mempunyai tahap pendidikan sekurang-kurangnya di peringkat diploma. Manakala 46.7 peratus pula mempunyai tahap pendidikan di peringkat sekolah menengah. Sebaliknya bagi usahawan yang kurang berjaya sebahagian besar (59.2 peratus) hanya memiliki pendidikan di peringkat sekolah rendah, malah terdapat sebanyak 8.7 peratus dalam kalangan usahawan yang tidak mempunyai pendidikan formal. Analisis kajian juga merumuskan bahawa tahap pendidikan formal usahawan mempunyai hubungan yang positif dengan prestasi perusahaan iaitu semakin tinggi tahap pendidikan yang dimiliki, semakin baik prestasi perusahaan yang dicapai.

Thuwaibah et al. (2007) menyatakan bahawa usahawan yang berpendidikan tinggi berupaya mengelakkan operasi. Dapatkan ini disokong oleh pengkaji lain seperti Osirim (1990) dan Romano & Lourens (1992) yang juga menyokong bahawa pendidikan adalah berhubungan positif dengan prestasi perusahaan. Penemuan kajian yang dijalankan menyatakan bahawa pendidikan formal mempunyai pertalian dengan pengoperasian firma secara terus-menerus. Mereka yang menerima pendidikan formal yang berkaitan dengan jenis pekerjaan, berkebolehan dan berpengalaman mampu memperkembangkan operasi. Ini adalah kerana mereka yang berpendidikan tinggi mempunyai pandangan yang luas, inisiatif, kreatif, inovatif dan mampu menguruskan perusahaan dengan baik (Williams 1990).

Kebanyakan kajian lepas mendapati bahawa faktor pendidikan merupakan antara faktor modal insan yang sangat penting. Namun dalam perusahaan berbentuk mikro dan kecil, kajian mendapati faktor tersebut tidak mempunyai pengaruh positif ke atas prestasi dan kejayaan perusahaan yang diusahakan. Terdapat kajian yang menunjukkan bahawa tiada hubungan yang wujud antara pendidikan dan kejayaan dalam

bidang keusahawanan. Kajian yang dijalankan oleh Rosman&MohdRosli (2011) mendapati bahawa perusahaan kecil yang diusahakan adalah tidak memerlukan tahap pendidikan yang tinggi untuk mencapai prestasi perusahaan yang baik. Bagaimanapun ia memerlukan minat dan kesungguhan diri. Di samping itu, pengusaha perlu memiliki pengalaman perniagaan yang dilihat sebagai faktor yang lebih penting daripada tahap pendidikan untuk mencapai kejayaan terutamanya dalam bidang yang memerlukan kemahiran seperti usahawan yang membuka kedai tayar dan bengkel, kedai gunting rambut, pengusaha makanan dan teknikal. Di samping aspek pengalaman, dapatkan kajian juga menunjukkan kemahiran juga adalah penting berbanding tahap pendidikan. Dapatkan kajian ini adalah konsisten dengan dapatkan kajian oleh Mohamad Asri&Zaimah (2012) ke atas usahawan Melayu di negeri Johor di mana dapatkan kajian menunjukkan tahap pendidikan adalah tidak memainkan peranan penting yang mendorong mereka menceburi bidang keusahawanan. Selain itu, dapatkan kajian oleh Nor Ghani et al. (2002) juga menyatakan bahawa pendidikan adalah tidak penting dalam aktiviti keusahawanan.

Kajian Stuart & Abetti (1990) juga mendapati mereka yang mempunyai ijazah tidak mampu melaksanakan tugas dalam perniagaan dengan baik. Romano & Lourens (1992) telah membuat kesimpulan bahawa pendidikan formal bukan faktor yang penting dalam kejayaan perniagaan yang berbentuk kecil-kecilan. Hubungan negatif yang wujud antara tahap pendidikan dengan prestasi perusahaan mikro dan kecil di kaitkan dengan saiz perniagaan yang terlalu kecil dan tidak memerlukan kelulusan akademik yang tinggi untuk menggerakkannya. Walaupun kebanyakan usahawan tidak mempunyai pencapaian akademik yang tinggi, namun disebabkan oleh faktor pengalaman dan kemahiran yang tinggi dimiliki menyebabkan mereka lebih berkemampuan untuk memastikan prestasi perusahaan yang lebih baik berbanding mereka yang mempunyai tahap pendidikan yang tinggi.

Walau bagaimanapun, kerajaan Malaysia menekankan aspek pembangunan modal insan dalam kalangan rakyat dengan

menekankan aspek pendidikan dan latihan. Justeru, kerajaan berusaha untuk memperkasakan modal insan dengan menekankan aspek pendidikan dan latihan yang merupakan asas kejayaan ke masyarakat yang berjaya. Menurut Aidit (2008), pelaburan dalam aspek pendidikan dan latihan merupakan pelaburan yang amat penting terhadap sumber manusia. Hal ini adalah kerana seseorang manusia tidak akan dapat menggunakan potensi yang ada pada dirinya dengan semaksimum mungkin sekiranya ia tidak digilap dan diberi pendedahan sewajarnya. Melalui pendidikan dan latihan, bukan sahaja potensi yang ada pada diri seseorang dapat dibangunkan bahkan pengetahuan dan kemahiran-kemahiran lain juga dapat diserapkan secara tidak langsung. Secara tidak langsung, peranan modal insan dalam aktiviti keusahawanan juga adalah amat penting dalam memastikan kelangsungan dan kejayaan prestasi perusahaan yang dijalankan.

Justeru, kepentingan pembangunan modal insan dalam kalangan usahawan bumiputera adalah amat penting untuk dikaji. Pengetahuan dan pendedahan yang diberikan kepada usahawan bumiputera berkaitan aspek modal insan mampu meningkatkan *value added* pengusaha di mana usahawan mampu dan boleh menciptakan sesuatu yang baru. Selain itu, pandangan umum kepada usahawan bumiputera berubah dan mampu untuk berdiri seiring dengan pengusaha dalam kalangan kaum lain. Bantuan dan sokongan kerajaan melalui agensi-agensi berkaitan adalah perlu diteruskan dan ditambah baik selaras dengan matlamat kerajaan untuk pembangunan modal insan dan ekonomi bumiputera. Institusi adalah disarankan untuk memperkasakan lagi program khidmat nasihat perniagaan, program pembangunan pemasaran, program latihan keusahawanan bagi membangunkan lagi lebih ramai pengusaha dalam kalangan bumiputera.

Sokongan Kerajaan Ke Arah Pembangunan Modal Insan

Sokongan kerajaan kepada pembangunan masyarakat keseluruhan

merupakan perkara yang dititikberatkan bagi menjamin kualiti hidup rakyat. Sebagai sebuah negara yang sedang pesat membangun, kerajaan berusaha untuk meningkatkan taraf hidup dan ekonomi rakyat semenjak DEB digubal sehingga dasar-dasar yang lain seperti Dasar Pembangunan Nasional (DPN), Dasar Wawasan Negara (DWN) dan terkini Dasar Transformasi Nasional seiring dengan perubahan pucuk pimpinan negara dengan masih mengekalkan matlamat untuk mencapai MPPB.

Kesungguhan dan komitmen kerajaan dalam konteks pembangunan modal insan di Malaysia direalisasikan dengan memasukkan agenda modal insan sebagai salah satu elemen utama bermula dari Rancangan Malaysia Ke-sembilan (RMK-9) dan kesinambungannya dalam Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMK-10). Menurut bekas Perdana Menteri Malaysia ke lima, Abdullah Ahmad Badawi (2006) dalam pembentangan belanjawan negara, modal insan yang berkualiti adalah satu kemestian serta keperluan dan bukan satu kemewahan. Justeru, pembangunan modal insan yang merupakan tunjang kepada ‘pembangunan lunak’ dalam era Abdullah ditonjolkan dengan pendekatan yang lebih holistik. Dua faktor yang menurut Abdullah boleh menjadi kekangan kepada hasrat Malaysia menjadi negara maju ‘pemunyaan infrastruktur kelas pertama tetapi mentaliti kelas ketiga’ dan ‘kekurangan perisian berbanding peralatan’. Dalam hubungan ini, Abdullah telah melakukan penyimpangan penting dengan beralih dari acuan pembangunan korporat dan sistem penaungan kepada penumpuan terhadap PKS yang bertujuan untuk meminimakan kesan negatif pembangunan ekonomi. Antara langkah yang diambil pentadbirannya termasuklah meningkatkan dana belanjawan yang begitu besar, penubuhan Bank Perusahaan Kecil dan Sederhana dan Bank Pembangunan Malaysia Berhad serta pemberian insentif untuk pengusaha yang terlibat dengan industry halal (Muhamad Takiyuddin 2014).

Sokongan kerajaan terhadap pembangunan PKS semakin dipergiatkan oleh kerajaan Malaysia terutamanya untuk

pembangunan kaum bumiputera dengan kerjasama institusi bagi pembangunan modal insan. Bagaimanapun, golongan pengusaha bumiputera masih tidak mampu untuk bersaing dengan kaum lain dan masih ketinggalan berbanding kaum Cina dan India. Menurut Syed Ali (2010), seperti mana dalam bidang politik, kaum bumiputera turut berdepan dengan dilema ekonomi yang rencam. Ketika kaum lain menikmati kelebihan ekonomi negara dalam peratusan yang besar, usahawan bumiputera masih lagi bergelut untuk meneruskan *survival*. Meskipun Bumiputera merupakan kaum majoriti dan pengguna yang terbesar, namun penguasaan ekonomi kaum Bumiputera dan bukan Bumiputera jelas tidak seimbang. Terdapat segelintir kecil sahaja usahawan Bumiputera yang terlibat dalam ekonomi kritikal dan bernilai tinggi dan selebihnya menjalankan perniagaan kecil-kecilan yang keuntungannya tidak banyak merubah taraf hidup walaupun pihak kerajaan dengan kerjasama institusi berusaha untuk memajukan kaum Bumiputera.

Statistik yang dikeluarkan oleh Unit Perancang Ekonomi dan Jabatan Perangkaan Malaysia menunjukkan kaum Bumiputera masih jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan kaum bukan Bumiputera dan pendapatan isi rumah mengikut kumpulan etnik juga menunjukkan perbezaan yang ketara antara kaum bumiputera, Cina dan India serta lain-lain etnik. Justeru, keadaan ini dapat dilihat berdasarkan Jadual 1 jelas menunjukkan pendapatan isi rumah mengikut kumpulan etnik masih terdapat jurang yang agak ketara antara kaum. Begitu juga pendapatan isi rumah mengikut kawasan di bandar dan luar bandar.

Perniagaan dan keusahawanan merupakan aktiviti ekonomi terpenting bagi menjana pendapatan dan kekayaan. Walau bagaimanapun, penglibatan bumiputera dalam kegiatan keusahawanan masih rendah. Isma Addi & Mohamad Zahir (2011) menyatakan terdapat banyak kajian yang menunjukkan bahawa bidang perniagaan dan keusahawanan bukan sahaja penyumbang kepada peningkatan pendapatan per kapita, malah turut bertindak sebagai perubahan struktur sosial dan masyarakat di samping

mengurangkan masalah kemiskinan dan membuka peluang pekerjaan. Berdasarkan prinsip tersebut, terdapat banyak institusi yang memberikan tumpuan kepada pembangunan sebagai usahawan. Namun, agak kurang kajian mahupun agensi yang memberikan tumpuan terhadap pembangunan modal insan terutamanya dalam kalangan pengusaha bumiputera ke arah mentransformasikan mereka sebagai usahawan yang berdaya saing. Suhaila et al. (2014) turut menyatakan bahawa peranan kerajaan adalah amat signifikan untuk dikaji dalam menyumbang kepada pembangunan usahawan dan modal insan bumiputera di samping membangunkan komuniti masyarakat yang tidak berpendapatan tetap untuk mencapai sasaran kerajaan (Abdul Rahman Embong 2007).

Merujuk kepada latar belakang ekonomi penduduk di Malaysia, pada hakikatnya, kaum bumiputera khususnya kaum Melayu merupakan kelompok etnik majoriti namun penguasaan kaum tersebut dalam bidang ekonomi dan keusahawanan berbentuk PKS masih lagi rendah jika dibandingkan dengan kelompok etnik yang lain (Syed Ali 2010; Suhaimi 2013). Akibat daripada ketidakseimbangan yang berlaku di antara komposisi etnik kaum dalam bidang perekonomian, kerajaan Malaysia telah memperkenalkan satu dasar yang memberi penekanan kepada pembangunan kaum bumiputera khususnya iaitu DEB menerusi Rancangan Malaysia Kedua (1971-1975) untuk menyusun semula jurang yang berlaku dalam masyarakat. Pada prinsipnya, pelaksanaan dasar tersebut merupakan satu program jangka panjang berkuat kuasa dua puluh tahun bermula tahun 1970 sehingga tahun 1990. Antara dasar yang diperkenalkan untuk menyusun semula masyarakat ialah dengan pewujudan sebuah komuniti perniagaan dan perindustrian yang menumpukan kepada etnik bumiputera. Objektif yang disasarkan adalah penguasaan bumiputera dalam sektor perekonomian dapat ditingkatkan sekurang-kurangnya tiga puluh peratus (Suhaimi 2013).

Sepanjang tempoh pelaksanaan dasar tersebut, meskipun pemilikan modal

saham Bumiputera berjaya ditingkatkan, namun keputusannya adalah gagal mencapai matlamat yang disasarkan iaitu sebanyak tiga puluh peratus. Menyedari hakikat tersebut, kerajaan telah memperkenalkan satu dasar baru bagi menggantikan DEB dengan menggubal DPN melalui Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua merangkumi tempoh sepuluh tahun bermula tahun 1991 sehingga tahun 2000 dan masih lagi mengekalkan perkara-perkara asas dalam program DEB (Suhaimi 2013; SityDaud 2003). Dimensi baru DPN adalah memberi tumpuan khusus kepada strategi pembasmian kemiskinan dalam kalangan rakyat dengan meneruskan objektif DEB (SityDaud 2003). Dalam RMK-8, pegangan ekuiti oleh golongan Bumiputera masih berada di bawah paras tiga puluh peratus yang menjadi sasaran dalam DEB (Norashidah Hashim et al. 2009). Pemilikan ekuiti Bumiputera sehingga tahun 2011 adalah sebanyak 23.5% dan kerajaan terus berusaha untuk meningkat dan mengekalkan pemilikan ekuiti dan penguasaan Bumiputera supaya sasaran tiga puluh peratus pemilikan ekuiti Bumiputera dapat dicapai menjelang 2020 (Unit Perancang Ekonomi 2014).

Menyedari kepentingan dan sumbangan industri PKS kepada ekonomi negara, kerajaan telah menyediakan pelbagai peluang dan bantuan. Bantuan, sokongan serta peluang ini adalah untuk menggalakkan rakyat Malaysia menceburkan diri dalam bidang perniagaan di peringkat kecil-kecilan sehingga ke skala besar dan antarabangsa. Pihak kerajaan dan badan-badan bukan kerajaan (NGO) telah menganjurkan pelbagai program dan latihan untuk mendidik dan melatih masyarakat Malaysia khususnya kaum bumiputera dalam bidang perniagaan. Program-program dan latihan ini dibuat khusus untuk golongan bumiputera kerana mereka mempunyai potensi yang besar untuk cemerlang dalam bidang perniagaan (Thuwaibah et al., 2007). Pihak kerajaan berusaha melakukan pelbagai langkah dan tindakan serta menggubal pelbagai dasar awam bagi memastikan kepentingan rakyat terjamin (Atory 2008). Dasar awam merupakan perancangan yang dibuat oleh kerajaan berkaitan dengan tindakan kerajaan sebagai

apa juga langkah kerajaan untuk membuat pilihan atau tidak membuat (Atory 1996:1). Namun begitu, pelaksanaan dasar untuk pembangunan sektor PKS adalah bergantung pada faktor politik sesebuah negara dan kerajaan sebagai pentadbir dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan apa sahaja program, projek, rancangan yang akan membawa kebaikan kepada negara dan rakyat (Atory 1992) dan (Kjellman et al. 2004).

Dasar kerajaan terhadap pembangunan PKS wujud dalam bentuk bantuan dan sokongan. Dalam konteks ini, Sarder et al. (1997) menyatakan bahawa khidmat sokongan yang diberikan oleh kerajaan adalah merangkumi pelbagai jenis bantuan sama ada dalam bentuk kewangan dan bukan kewangan yang disediakan oleh kerajaan bagi memastikan perkembangan PKS. Berko & Guellette (2003) menjelaskan bahawa strategi khusus perlu dilakukan oleh kerajaan untuk meningkatkan perkembangan ekonomi dan menggalakkan aktiviti keusahawanan dalam masyarakat terutamanya bagi kaum bumiputera. Strategi dilakukan melalui tiga aspek iaitu pembangunan modal insan, pembangunan institusi dan penambahbaikan perkhidmatan ekonomi. Bentuk sokongan yang perlu disediakan termasuklah program latihan dan bimbingan, bantuan kewangan, pembentukan jaringan perniagaan dan kawalan kualiti. Peranan institusi yang terlibat secara langsung terhadap perkembangan PKS dan program sokongan untuk pembangunan PKS seperti modal dan latihan serta penerapan budaya keusahawanan dalam kalangan masyarakat yang melibatkan program jangka panjang dengan memberi penekanan kepada sistem pendidikan dan galakan untuk penglibatan masyarakat menerusi ahli politik dan pegawai kerajaan (Smallbone 1999).

Usaha bagi mewujudkan generasi kedua MPPB dan juga masyarakat Malaysia berbudaya keusahawanan ditekankan dalam Rancangan Malaysia Ke-sebelan (RMK-9) terutamanya faktor modal insan. Dasar ini memberi tumpuan kepada pembangunan modal insan berkualiti sebagai elemen kritikal dan teras kepada pembangunan

negara.Pembangunan modal insan ini dilaksanakan secara menyeluruh merangkumi pemerolehan pengetahuan dan kemahiran atau modal intelek sains dan teknologi termasuk keupayaan keusahawanan.Dasar ini dilaksanakan melalui pendidikan, latihan dan pembelajaran sepanjang hayat yang menjadi fokus dalam RMK-9 (Malaysia, 2006).Justeru, pendidikan di peringkat tertiari, khususnya di Institut Pengajian Tinggi (IPT) diberikan perhatian bagi menjana modal insan yang memenuhi wawasan negara (Rancangan Malaysia Kesembilan, 2006-2010).

Dalam RMK-9, pelbagai program latihan kemahiran dan keusahawanan dilaksanakan bagi membolehkan usahawan memajukan diri dan mengambil peluang dalam pasaran pekerjaan. Program latihan yang dilaksanakan oleh Yayasan Tekun Nasional (YTN) telah memberi manfaat kepada lebih 3,000 orang pengusaha bumiputera. Program yang sama juga dilaksanakan di bawah Program Keusahawanan MARA yang menyediakan latihan kepada 8,000 pengusaha. Di bawah Program Pembangunan Keusahawanan Pertanian pula, sebanyak 154 bengkel latihan dikendalikan yang memanfaatkan 6,328 pengusaha.Hasil daripada program ini, usahawan bumiputera berjaya menyertai industri makanan berdasarkan pertanian yang menghasilkan jumlah jualan sebanyak RM94.1 juta. Pelbagai usaha dilakukan bagi melengkapkan pengusaha dengan kemahiran dan pengetahuan dalam teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) seperti program Internet Desa dan e-Industri Desa.

Pelbagai program keusahawanan bagi golongan belia telah dilaksanakan selaras dengan modal insan yang diterapkan oleh kerajaan.Program Pembangunan Keusahawanan dilaksanakan bagi memupuk potensi keusahawanan dalam kalangan belia, untuk membolehkan mereka menyertai perniagaan secara aktif serta menggalakkan mereka bekerja sendiri.Bagi mencapai hasrat tersebut, MARA dan Institut Keusahawanan Negara (INSKEN) telah menganjurkan latihan, seminar dan kursus jangka pendek serta menyediakan khidmat nasihat kepada usahawan muda dan baru. Menerusi RMK-9,

pembangunan modal insan telah menjadi teras dalam mencapai Misi Nasional. Pembangunan modal insan dilaksanakan secara holistik merangkumi perolehan pengetahuan dan kemahiran atau modal intelek termasuk keupayaan keusahawanan dan pengetahuan sains dan teknologi serta memiliki sikap, nilai dan etika positif dan progresif melalui pendidikan, latihan dan pembangunan sepanjang hayat.Dalam tempoh RMK-9, seramai 79,740 belia di peringkat negeri dan daerah mendapat manfaat daripada program tersebut (Rancangan Malaysia Kesembilan, 2006-2010).Di bawah RMK-9 juga, institusi MARA mengambil pendekatan "*Project Creation-Private Driven*" PKS Bumiputera dengan memberi penekanan kepada penyelaras dan pemudahcara. Berasaskan kepada penekanan tersebut, ia memberi petunjuk bahawa usahawan perlu mengambil sikap lebih bertanggungjawab untuk mengurus dan memajukan bidang yang diusahakan (Suhaimi 2013).

Pembangunan modal insan diteruskan dalam RMK-10 (2011-2015).Kerajaan berusaha dengan menggerakkan pertumbuhan ekonomi, menuju ke arah pembangunan sosioekonomi secara inklusif, membangun dan mengekalkan modal insan bertaraf dunia dan mewujudkan persekitaran kondusif ke arah mempertingkatkan kualiti hidup(Rancangan Malaysia Kesepuluh).Dalam tempoh rancangan, kerajaan telah berjaya meningkatkan kecekapan dan menambah baik prosedur kerajaan terutamanya dalam meluluskan pengusaha dalam memulakan perniagaan yang dirancang.Pada tahun 2007, Kerajaan telah mengambil langkah penting dengan menubahruan PEMUDAH yang merupakan sebuah pasukan petugas khas bagi memudahkan perniagaan. Antara pencapaian penting PEMUDAH pada 2010 ialah memendekkan proses memulakan perniagaan sebelas hari ke tiga hari serta mengurangkan masa bagi pendaftaran hak milik harta dari 41 hari ke dua (2) hari dan mengurangkan masa untuk pulangan potongan cukai kepada 14 ke 30 hari berbanding satu tahun sebelum ini. Keadaan ini lebih memberi kemudahan kepada bakal

usahawan yang akan memulakan dan mengembangkan perniagaan.

Dalam RMK-10 juga, kerajaan memberi penekanan kepada para pengusaha yang gagal dalam perusahaan pada kali pertama akibat daripada terkesan oleh risiko perniagaan di luar jangkaan bagaimanapun pengusaha tersebut mempunyai potensi untuk berjaya, usahawan yang berkualiber dan berwibawa untuk bangkit semula. Kerajaan berusaha memberi peluang kedua untuk para usahawan yang gagal untuk bangkit semula menjadi usahawan yang berjaya. Justeru, undang-undang kebankrapan diper mudahkan untuk menyokong budaya mengambil risiko terhitung, menghapuskan stigma kegagalan dan menbenarkan usahawan berkualiber lagi wibawa yang gagal untuk kembali aktif. Selain itu, kerajaan mengecualikan beberapa peraturan perniagaan yang membebangkan syarikat kecil yang masih di peringkat awal untuk berkembang serta mempunyai lima orang pekerja atau kurang sehingga syarikat berkembang melebihi lima pekerja. Beberapa peraturan akan diper mudahkan untuk syarikat ini dalam urusan seperti pendaftaran perniagaan dan keperluan tenaga kerja. Keadaan ini adalah disebabkan terdapat PKS tempatan yang gagal untuk bertapak dalam pasaran tempatan dan mengembangkan perniagaan ke peringkat antarabangsa (Rancangan Malaysia Kesepuluh).

Bagi memastikan PKS mendapat akses yang mudah kepada kemudahan pembiayaan, Kerajaan telah menyediakan Skim Jaminan Modal Kerja berjumlah RM10 bilion ringgit dan Skim Jaminan Penstrukturkan Semula Industri berjumlah RM3 bilion ringgit. Justeru, dalam RMK-10, kerajaan memperuntukkan kemudahan kredit yang lebih mudah kepada pengusaha melalui agensi kewangan yang terlibat seperti Agro Bank supaya ia dapat memberikan perkhidmatan yang efektif kepada para usahawan PKS di samping SME Corp diberi peruntukan yang secukupnya bagi memastikan PKS yang berpotensi untuk berjaya dapat dibantu dengan sewajarnya. Penambahbaikan program pembangunan kemahiran dan keusahawanan serta pembiayaan melalui pelbagai agensi pembangunan Bumiputera dipertingkatkan.

Justeru, pakej secara bersepadu dilaksanakan bagi meningkatkan daya saing dan daya maju MPPB termasuk latihan keusahawanan, bantuan teknikal, pembiayaan, khidmat rundingan serta promosi dan pemasaran. Oleh yang demikian, bagi meningkatkan akses kepada kemudahan pembiayaan, sebanyak RM1.5 bilion ringgit atau separuh daripada dana Skim Jaminan Modal Kerja diperuntukkan kepada usahawan Bumiputera. Di samping itu, organisasi pembangunan keusahawanan seperti MARA dan Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB) diperkuuhkan dan peruntukan sebanyak RM3 bilion ringgit disediakan bagi membantu usahawan bumiputera di samping pembangunan modal insan dengan menekankan budaya keusahawanan di peringkat IPT diperkuuhkan (Rancangan Malaysia Kesepuluh).

Lantaran itu, bagi menambah bilangan perniagaan baru dan menggalakkan budaya keusahawanan di Malaysia, Kerajaan menambah baik Program Internship Universiti-PKS. Pelajar universiti yang mempunyai kemahiran tertentu ditempatkan di syarikat-syarikat untuk tempoh dua hingga tiga bulan bagi mendapat pengalaman bekerja dan pengetahuan terkini mengenai amalan perniagaan. Di akhir tempoh rancangan, kerajaan menyasarkan untuk mewujudkan 2,000 perniagaan baru oleh para pelajar dan graduan. Justeru, Kerajaan dengan bantuan institusi yang terlibat berusaha untuk mempromosi budaya keusahawanan kepada golongan muda dengan menaja pertandingan pelan perniagaan di sekolah dan universiti, memperkenalkan kurikulum berkaitan perniagaan dan membayai kempen umum yang mempamerkan usahawan Malaysia yang berjaya. Selain itu, kerajaan dengan kerjasama institusi seperti MARA, Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM) dan TEKUN berusaha dalam memberi latihan kemahiran terutamanya kepada golongan muda yang tercicir di dalam persekolahan bagi membolehkan mereka mendapat peluang pekerjaan dan melibatkan diri dalam PKS bagi mengurangkan masalah kemiskinan. Selain kemudahan pinjaman yang diberikan, golongan ini turut diberikan latihan keusahawanan bagi membina keupayaan

mereka dalam bidang pengurusan kewangan, penyediaan rancangan perniagaan, pemasaran dan promosi dengan kerjasama institusi (Rancangan Malaysia Kesepuluh).

Suhaila, Suhaily& Muhammad Firdaus (2014) merumuskan bahawa bantuan, sokongan serta dasar yang telah dijalankan oleh kerajaan sebelum ini melalui institusi berkaitan perlu diteruskan dan dibuat penambahbaikan selaras dengan matlamat kerajaan untuk membangunkan ekonomi bumiputera. Justeru, adalah jelas bahawa PKS memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi negara. Perhatian yang cukup besar terhadap PKS ini adalah bertujuan untuk meningkatkan kemampuan PKS ke arah yang lebih baik, menyuntik lebih banyak sumbangan kepada ekonomi negara, membantu meningkatkan kemampuan ekonomi negara dan menjadikan PKS sebagai sumber yang dapat mengurangkan masalah ekonomi di Malaysia. Peranan institusi dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan juga adalah sangat penting dalam pembangunan usahawan yang berjaya terutamanya aspek modal insan.

Rumusan

Perniagaan dan keusahawanan merupakan aktiviti ekonomi terpenting bagi menjana pendapatan dan kekayaan. Bagaimanapun, penglibatan bumiputera dalam perniagaan PKS masih rendah disebabkan dengan pelbagai kekangan yang dihadapi (NajibRazak 2013). Berbanding di negara maju, kajian mengenai hubungan di antara aspek modal insan dan kejayaan PKS di Malaysia masih tidak banyak dilakukan secara mendalam (Rosman&MohdRosli (2011).Rosman&MohdRosli (2011) dan IsmaAddi&Mohamad Zahir (2011).menyatakan aspek modal insan masih kurang diberi penekanan dan kurang kajian di Malaysia yang berbentuk empirikal bagi melihat hubungan antara faktor tersebut dengan kejayaan pengusaha di samping peranan institusi yang terlibat terhadap pembangunan usahawan terutamanya bumiputera.

Dasar sokongan kerajaan kepada pembangunan PKS sentiasa dipertingkatkan

dengan kerjasama pelbagai kementerian dan institusi.Sebagai sebuah negara yang sedang pesat membangun, kerajaan berusaha untuk meningkatkan taraf hidup dan ekonomi rakyat semenjak DEB digubal sehingga kini.Justeru, dasar kerajaan terhadap pembangunan PKS adalah jelas dalam setiap rancangan pembangunan ekonomi.Komitmen yang diberikan oleh pihak kerajaan adalah bertujuan untuk menggalakkan pembangunan PKS.Bagi merealisasikan matlamat tersebut, pendekatan secara holistik dan menyeluruh serta komprehensif telah dijalankan merangkumi tiga teras strategik umum iaitu pengukuhan keperluan infrastruktur, penambahan kapasiti dan keupayaan serta akses kepada pembiayaan.

Rujukan

- Ab Aziz Yusof. 2010. *Pengenalan kepada Usahawan dan Keusahawanan*. Kuala Lumpur. ScholarmindPublising.
- Abu Bakar Nordin&Ikhsan Othman.2003. *Falsafah Pendidikan dan Kurikulum*. Kuala Lumpur: Quantum Books.
- Abdul Rahman Embong. 2007. *Pembangunan negara, komuniti dan insan melampaui 2020*. Bangi: Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa.
- Abdullah Ahmad Badawi. 2006. Kata Pendahuluan: Rancangan Malaysia Kesembilan. http://www.utusan.com.my/utusan/specialcoverage/rmk9/bahasa/kata_pendahuluan.pdf
- Ahmad AtoryHussin. 1996. *Politik dan Dasar Awam Malaysia*. Utusan Publication & Distribution Sdn. Bhd. Kuala Lumpur.
- Ahmad AtoryHussin. 2008. *Pembentukan Polisi Awam Ke Arah Pemahaman Yang Lebih Sistematis dan Analitis*. Utusan Publication & Distribution Sdn. Bhd. Kuala Lumpur.

- AuditGhazali. 2008. *Modal Insan: Membentuk Asnaf Kelas Satu*. Asnaf 1/2008, m/s: 6-7. Shah Alam: Lembaga Zakat Selangor.
- AiniJaafar. 2006. *Islam Dan Modal Insan*. Yayasan Dakwah Islamiah. <http://www.yadim.com.my/sosial/socialfull.asp?sosialid=320>
- BaharomMohamad&MohamadJohdi.2009. *Pembangunan Modal Insan Sebagai Satu Pelaburan Penting Dalam Konteks Pembinaan Negara*. Seminar Pembangunan Modal Insan. Pusat Sumber Pendidikan Negeri, PengkalanChepa Kota Baru, Kelantan.
- Bank Negara Malaysia (BNM).*Laporan Tahunan PKS 2006*. Kuala Lumpur. Bank Negara Malaysia, 2007.
- Barro, R.J. 1990. Government Spending in a Single Model of Endogenous Growth, *Journal of Political Economy*, 98, S103-S125.
- Barro, R.J. & Lee, J.W. 1996. International Measures of Schooling Years and Schooling Quality, *American Economic Review*, May, 80, 218-228.
- Bates, T. 1990. Entrepreneur Human Capital Inputs and Small Business Longevity. *The Review of Economics and Statistics*. 72(4), 303-520.
- Becker, G. S. 1964. *Human Capital*. National Bureau of Economic Research (NBER), New York.
- Berko, L. & Guellette, A. 2003. Policy For Support of Small and Medium-size Enterprises in Hungary: The Case of The Central Region. *Post-Communist Economies*, 15(2), 243-257.
- Birley, S. & Westhead, P. 1990. Growth and Performance Contrast Between Type of Small Firms. *Strategic Management Journal*, 11(7), 535-557.
- Blaug, M. 1976. The Empirical Status of Human Capital Theory: A Slightly Jaundiced Survey. *Journal of Economic Literature*. Vol (14), 827-855.
- Brush, C. G. & Hisrich, R. D. (1991). Antecedent influences on women-owned businesses. *Journal of Managerial Psychology*, Vol. 6 (2), 9 - 16 .
- Bruwer, J. De W. & Haydam, N.E. 1996. Human Capital Investment: Higher Educational and on the Job Training of the Marketing Practitioner. *South African Journal of Business Management*, (27) 1-8.
- Christ, K. & Green, R. 2004. Public Capital and Small Firm Performance. *Atlantic Economic Journal*, 32(1), 28-37.
- Coulter, M. 2003. *Entrepreneurship in Action*, New Jersey: Prentice Hall.
- Cooper, Robert G. (2000). Product Innovation and Technology Strategy. *Journal of Technology Management*. 38-41.
- Cuba, R., DeCenzo, D. & Anish, A. 1983. Management Practices of Successful Female Business Owners. *American Journal of Small Business*, 8(2), 40-46.
- De Gregorio, J. 1992. Economic Growth in Latin America, *Journal of Development Economics*, 39(1), 59-84.
- Denison, E.F. 1967. *Why Growth Rates Differ: Post War Experience in Nine Western Countries*, Brookings Institution, Washington D.C.

- Eshima Yoshihiro. 2003. Impact of Public Policy on Innovative SMEs in Japan. *Journal of Small Business in Management*, 41(1), 85-93.
- Fernandez, E. & Mauro, P. 2000. The role of Human Capital in Economic Growth: The Case of Spain. *IMF Working Paper*. Wp/1000/8: 1-27.
- Fischer, E. M., Reuber, a.R. & Dyke, L.S. 1993. A Theoretical Overview and Extension of Research on Sex, Gender and Entrepreneurship. *Journal of Business Venturing*. 8, 151-168.
- Garcia, M.U. 2005. Training and Business Performance: The Spanish Case. *International Journal of Human Resources Management*, 16(9), 1961-1710.
- Green, G. P., & Haines, A. 2012. *Asset building and community development* (3rd ed.). Sage publications.
- Hansen, P. & Knowles, S. 1997. Human Capital and Return to Scale, *Journal of Economic Studies*, 25, 118-123.
- Hewlett, R. 2002. Integrating Human Capital Concepts in Productivity and Growth Topics. *Journal of Management Research*, 2(1), 26-34.
- Hisrich, R.D & Brush, C. 1984. The Women Entrepreneur: Management Skills and Business Problems. *Journal of Business Management*, 22(1), 30-37.
- IsmahdiHj. Ismail. 2008. *Pendekatan Agama Perlu Dititikberatkan Dalam Modal Insan*. Asnaf 1/2008, m/s: 15. Shah Alam: Lembaga Zakat Selangor.
- IsmaAddiJumbri&Mohamad Zahir Zainudin. 2011. Pembangunan Modal Insan dalam Kalangan Fakir dan Miskin Sebagai Usahawan: Kajian Kes di Lembaga Zakat Selangor. *Journal of Human Capital Development*. Vol. 4 No. 2: 41-56.
- Jabatan Perangkaan Malaysia. 2010. *Siaran Khas Penyiasatan Tenaga Buruh, Usahawan di Malaysia*.
- Katz, L. and Murphy, K. 1992. Changes in Relative Wages, 1963-1987: Supply and Demand Factors, Quarterly *Journal of Economics*, 108, 33-60.
- Kjellman, A., Sundnas, A.C., Ramstorm, J. & Elo, M. 2004. *Internationalisation of Small Firms*, Finland: KEAB Paper.
- Lauder, D., Boocock, G. & Presley, J. 1994. The System of Support for SMEs in the UK and Germany. *European Business Review*, 94(1), 9-16.
- Lynch, I.M. 1991. The Role of Off-the-job Training Versus On-the-job Training for the Mobility of Women Workers, *American Economic Review*, 81(2), 151-156.
- MasturaJaafar, T. Ramayah& Osman Mohamad. 2004. *Owner/Manager Characteristics and Business Success: A Study Among Malaysian Contractors*. Universiti Sains Malaysia.
- McPherson, M. 1996. Growth of Micro and Small Business Enterprises in Southern Africa. *Journal of Development economics*, 48(2), 253-277.
- Mengistae, T. 2006. Competition and Entrepreneurs' Human Capital in Small Business Longevity and Growth. *Journal of Development Studies*, 42(5).812-836.
- Mincer, J. 1970. The Distribution of Labor Income: A Survey With Special Reference to Human Capital

- Approach. *Journal of Economic Literature* 8:1-26.
- MohdNajib Bin Abdul Razak. 2013. *Teks Ucapan Majlis Pemerkaasan Ekonomi Bumiputera*, Pejabat Perdana IMenteri, Putrajaya Malaysia.
- Mohd Taib, A. & Zuraidah Z. 2002. Pengaruh Pendidikan dan Program Latihan Ke atas Kejayaan Usahawan Bumiputera, Dalam *Prodidng Persidangan Kebangsaan IKS: Memperkasakan IKS Melalui Penyelidikan dan Inovasi*. Kota Kinabalu: Universiti Utara Malaysia, Sintok.
- Muhammad HisyamMohamad. 2005. *Islam Hadhari Bentuk Modal Insan Berkualiti*. Institut Kefahaman Islam Malaysia. <http://www.ikim.gov.my/v5/index.php>
- MuhamadTakiyuddin Ismail. 2014. *Saga Neokonservatif; Abdullah Badawi, UMNO dan Konservativisme*. Bangi: Penerbit UKM.
- Murthy, N.R.V. & Chien, I.S. 1997. The Empirical of Economic Growth for OECD Countries: Some New Findings, *Economic Letter*, 55, 425-429
- Nedrum, L. & Erikson, T. 2001. Intellectual Capital: A Human Capital Perspective. *Journal of Intellectual Capital*, 2(2), 127-135.
- NorashidahHashim, Norasmah Othman & Noraishah Buang. 2009. Konsep Kesediaan Keusahawanan Berdasarkan Kajian Kes Usahawan IKS di Malaysia. *Jurnal Pendidikan Malaysia*. 34(1), 187-204.
- Nor Ghani, M.N., AbdRazak, D. & Mohd Ali, M.N. 2002. The Contribution of Zakat as an Income Creating Asset in Selangor and Wilayah Persekutuan, Malaysia. *Jurnal Ekonomi Malaysia*, 36, 69-80.
- Noor ZalikaMahmadZuki. 2013. *Cabar dan Halangan Membangunkan Usahawan Bumiputera Berjaya*. Kedah.
- Otami, I. & Villanueva, D. 1990. Long-term Growth in Developing Countries and its Determinants: An empirical Analysis, *World Development*, 18(6), 769-783.
- Petrof, J. V. 1980. Small Business and Economic Development: The Case for Government Intervention. *Journal of Small Business Management*, 18(1), 51-56.
- Pritchett, L. 1996. Where has all the Education Gone? *World Bank Working Paper*, No.1581, World Bank, New York.
- Rancangan Malaysia Kelapan (RMK – 8) (2001 – 2005), Jabatan Penerangan Malaysia.
- Rancangan Malaysia Kesepuluh, 2011-2015
- Rancangan Malaysia Kesembilan (2006–2010), m/s 254–259.
- Rahmah Ismail. 2009. *Modal Manusia dan Prestasi Industri*. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Rahmah Ismail. 2012. *Modal Manusia Dalam Pembangunan Ekonomi Memacu Produktiviti dan Daya Saing*. Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.
- Romano, Claudio A. Lourens, Laurie T. 1992. *Small Business and Entrepreneurial Research using the case Study Approach*. Proceedings of the ENDEC World Conference on Entrepreneurship, August 1992, Singapore, 586-594.
- RosmanMahmood&MohdRosliMohamad.2011. *Perusahaan Kecil dan Dilema*

- usahaawan Melayu.* Penerbit, Universiti Malaya Kuala Lumpur.
- Sarder, J.H., Ghosh, D. & Rosa.P. 1997. The importance of Support Services To Small Enterprises in Bangladesh. *Journal of Small Business Management*, 35(2), 26-35.
- Schultz, Theodore W. (1971), Investment In Human Capital: The Role Of Education And Of Research, New York: The Free Press. 161.
- Simpson, M., Tuck, M. & Bellamy S. 2004. Small Business Success Factors: The Role Of Education And Training. *Education and Training*, 8(8-9), 481-491.
- SityDaud. 2004. *Globalisasi dan Negara Pembangunan*. Bangi. Universiti Kebangsaan Malaysia.
- SityDaud. 2003. *Negara Pembangunan Malaysia*. Tesis diserahkan untuk Ijazah Doktor Falsafah. Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Smallbone, D. 1999. Policy to Support SMEs in the UK: Some Lesson for Asian Countries? *International Conference on Small and Medium Enterprises at New Crossroad: Challenges and Prospects*. Penang Malaysia, Universiti Sains Malaysia (USM).
- Stuart, R. & P.A. Abetti. 1990. Impact of Entrepreneurial and Management Experience on Early Performance. *Journal of Business Venturing* 5: 151-162.
- Strober, M.H. 1990. Human Capital Theory: Implication for HR Managers. *Industrial Relations*, 29(2), 214-240.
- SuhailaNadzri, SuhailyMdShamsudin& Muhammad Firdaus Muhammad Sabri. 2014. Faktor-Faktor Penyumbang Kepada Kejayaan dan Kegagalan Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) Bumiputera Di Malaysia. *e-Prosing*, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. 191-200.
- Suhaimi Abdullah. 2013. *Peranan MARA dalam Memperkasa Usahawan*. Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) keluaran edisi XXIV.
- Syed Ali Al-Attas. 2010. Peniaga Melayu Perlu Bimbingan. *Utusan Malaysia*, 25 Jun 2010.
- Thuaibah@suaibah Bakar, AzlahMd Ali, Rozeyta Omar, HishamuddinMdSom, SyaharizatulNoorizwanMukhtar. 2007. *Penglibatan Kaum Wanita Dalam Aktiviti Keusahawanan di Negeri Johor: Kajian Terhadap Faktor-Faktor Kritisikal Kejayaan Dan Kegagalan Pengendalian Perniagaan*. Jabatan Pembangunan Sumber Manusia, Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Johor Baru.
- Unit Perancang Ekonomi. 2010. *Rancangan Malaysia Kesepuluh*, Jabatan Perdana Menteri, Putrajaya.
- Unit Perancang Ekonomi dan Jabatan Perangkaan Malaysia – *Penyiasatan Pendapatan Isi Rumah, 2004 dan 2009 dalam RMK-10* (2011-2015).
- Van Loo, J.B. & Rocco, T.S. *Continuing Professional Education and Human Capital Theory*. Online Submission, Paper presented at the Academy of Human Resource Development International Conference (AHRD) (Austin, TX, Mar 3-7, 2004), 98-105.
- Webster, B., Walker, E. & Brown, A. 2005. Australian Small Business Participation in Training Activities. *Education and Training*, 47(8-9), 552-561.

ZainiMahbar, ZaimahDarawi&Hasnah Ali.

1995. *Teknologi dan Kemahiran Dalam Industri Skala Kecil. Industri Kecil Malaysia, Isu Pembiayaan, Teknologi dan Pemasaran.* Bangi, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).